

BAB V - KESIMPULAN & SARAN

5.1. KESIMPULAN

Collaborative Governance antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Nama Rupabumi ini sangat penting untuk pengenalan suatu objek yang ada dipermukaan bumi baik yang alami atau buatan, karena nama rupabumi merupakan bagian penting dari komunikasi. Dan dalam penamaan nama rupabumi tersebut perlu adanya standar baku.

Selain itu nama Rupabumi baku juga bisa untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai – nilai budaya, Sejarah, dan adat istiadat. Serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, yang dimana dalam penyelenggaraan nama rupabumi itu perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian Hukum.

5.2. SARAN

5.2.1 Saran Praktis

- 1) Perlu adanya koordinasi yang baik agar pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam hal penamaan Rupabumi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar beberapa pihak dalam hal penamaannya.
- 2) Penamaan nama rupabumi menjadi bagian yang dijadikan prioritas dalam rencana kerja tahunan oleh pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan.

- 3) Penambahan SDM dalam Penyelenggaraan nama rupabumi baik SDM Badan Informasi Geospasial ataupun SDM Pemerintah Daerah.
- 4) Adanya persiapan anggaran Pemerintah dalam proses penyelenggaraan nama rupabumi

5.2.2 Saran Teoritis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk bisa menggali informasi lebih banyak dengan berdasarkan pada sumber - sumber data ataupun informasi dalam proses kolaborasi dalam penyelenggaraan nama Rupabumi ini.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan lebih mendalam mengenai strategi terkait proses Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.

